

## DINAMIKA PARTAI MASYUMI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945 - 1949)

**Alfi Hafidh Ishaqro\***

### **Abstrak**

*Masa pendudukan Jepang menjadi tahap yang fundamental bagi kelahiran Partai Masyumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat itu disebut "Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia Raya". Pada bulan November 1943 lahirlah Masyumi pertama, Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Masyumi menjadi sarana baru bagi Jepang untuk menarik simpati masyarakat muslim agar mendukung kepentingan perang Jepang yang terlihat mulai terdesak. Pada bulan Februari 1945, Masyumi mendapatkan keuntungan dari usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari 1944, pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh-pengaruhnya sebagai representasi perjuangan rakyat Indonesia. Seiring dengan hal tersebut Jepang memberikan keleluasaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara. Masyumi berbeda dengan organisasi Islam lain yang lahir sebelumnya, selama kurun waktu setahun sejak pendiriannya Masyumi mampu melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Diantara lain membangun jaringan kesuluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang besar dan menyatukan berbagai kelompok perjuangan kaum Islam. Partai Masyumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia saat itu.*

### **Kata Kunci: Dinamika, Partai Masyumi**

#### **Pendahuluan**

Meski hanya berlangsung selama tiga tahun, sejak Maret 1942 hingga Agustus 1945, masa pendudukan Jepang menjadi tahap yang fundamental bagi kelahiran Partai Masyumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat itu disebut "Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia Raya". Dari niat itu, pada bulan November 1943 lahirlah Masyumi pertama, Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia.

Hubungan paternal organisasi ini dengan partai Islam bernama sama yang

didirikan bulan November 1945 ternyata lebih rumit dan dinamis dari yang terlihat saat ini. Itu semua diperkirakan karena pembagian peran antara ulama pemimpin organisasi-organisasi Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) disatu pihak, dan para politisi dari gerakan Sarekat Islam disisi yang lainnya. Pihak pertama yang berasal dari organisasi Islam yang menjadi para pemimpin Masyumi bentukan Jepang menarik diri ketika partai baru didirikan. Pihak yang berasal dari para politisi Sarekat Islam adalah mereka yang pada saat pendudukan Jepang tak banyak terlibat kolaborasi dengan para pimpinan militer pemerintahan Jepang. Awal mula

\* **Alfi Hafidh Ishaqro** adalah Peneliti Politik Islam, sedang menyelesaikan studi di Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Jepang berhasil menemukan dan mengkonsolidasikan Islam di Asia adalah pada pertengahan tahun 1920-an. Melihat peluang kerjasama untuk mewujudkan mercusuar politiknya Jepang tidak melewatkan momentum tersebut. Pada 1939, Tokyo menjadi tuan rumah konferensi pan-Islamisme yang dihadiri Negara-negara di Asia dan Indonesia dihadiri oleh para wakil dari MIAI. Beberapa bulan sebelum invasi Jepang, dibentuklah sejumlah jaringan bawah tanah di Nusantara. Di dua wilayah di Sumatera, jaringan tersebut membantu pendaratan tentara Jepang<sup>1</sup>. Sekali melangkah, Jepang berhasil membangun landasan diatas kekuatan propaganda Islam ditengah masyarakat Nusantara untuk memobilisasi dukungan rakyat setempat.

Pada dasarnya Jepang menolak segala bentuk ekspresi politik Islam, sehingga pada tahun 1942 PSII dan PII dibubarkan. Pada saat yang sama, otoritas militer Jepang, membuat badan-badan sendiri yang bertujuan mengendalikan umat Islam di Indonesia. Badan-badan tersebut antara lain Komite Persiapan Persatuan Umat Islam yang dipimpin oleh Abikusno Tjokrosujoso, mantan ketua PSSI dan saudara lelaki H.O.S. Tjokroaminoto, Jepang juga membentuk Biro Urusan Agama (*Shumubu*) yang dipimpin ulama tradisional Hadaratus

Syaikh K.H. Hasyim Asyari. Pada September 1942 Jepang mengizinkan kembali berdirinya MIAI yang dipercaya memegang peranan penting dalam kerangka konsolidasi kekuatan Islam yang lebih riil dan kongkrit.<sup>2</sup>

Dibalik segala upaya dan usaha menyatukan kekuatan Islam, pengakuan terhadap peranan strategis Islam ternyata belum mampu memenuhi harapan dikedua belah pihak, yakni Jepang dan pihak Islam Indonesia. Di pihak Indonesia, segera disadari bahwa niat baik Jepang tak lebih dari upaya memperdaya dan memeralat kekuatan Islam untuk menopang usaha invasi militernya yang tersusun secara hati-hati dan sangat halus. Niat bekerjasama dengan para ulama berpengaruh tak kunjung tercapai dengan memuaskan dan dalam waktu yang singkat berbagai kompromi berantakan karena ulah ceroboh para tentara Jepang yang diluar kendali pimpinan militernya, terutama menyangkut *sakerai* yakni upacara penghormatan terhadap kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dan menghadap ke arah Tokyo. Hal ini tidak dapat diterima dan sangat menyakiti umat Islam karena bertentangan dengan keyakinan dan prinsip yang mereka anut. Dianggap pembangkang, berbagai insiden dan keributan disejumlah tempat pecah hingga menelan Korban,

<sup>1</sup> Benda, J. *Bulan Sabit dan Matahari*. (Jakarta, Pustaka Jaya: 1980) hlm. 103.

<sup>2</sup> Kamaruzzaman. *Wajah Baru Islam Indonesia*. (Yogyakarta, UII Press: 2001). hlm. 112.

bahkan tokoh terkemuka dari Nahdlatul Ulama yakni K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Mahfidz Siddiq dijebloskan kedalam penjara selama berbulan bulan karena penentangannya yang sangat keras atas pemaksaan *sakerai* kepada umat Islam.<sup>3</sup>

Selain itu, faktor lain yang merenggangkan hubungan Jepang dan umat Islam adalah upaya MIAI untuk melepaskan diri dari kendali Jepang. Indikatornya adalah kegiatan pengumpulan zakat besar-besaran yang dilakukan oleh MIAI untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Usaha MIAI ini meluas hingga meliputi 35 karesidenan di pulau Jawa dan dianggap menggerogoti otoritas biro urusan agama atau *shumubu* yang menjadi organisasi resmi bentukan Jepang untuk mengendalikan kegiatan umat Islam.<sup>4</sup>

Menyadari kegagalan “operasi terhadap umat Islam”, pemerintah Jepang berpaling kepada kubu nasionalis. Pada April 1943, Jepang mendirikan “PUTERA”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peristiwa Penentangan *sakerai* dimuat dalam film Sang Kyai yang disutradarai oleh Rako Prijanto yang dirilis pada tahun 2013, dalam film tersebut terlihat jelas bagaimana umat muslim mempertahankan kehormatan akidahnya dengan menentang *sakerai*, penentangan inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor kuat perselisihan panjang antara kelompok muslim dan pemerintah militer Jepang.

<sup>4</sup>Benda. *Matahari dan Bulan Sabit*, hlm. 145.

<sup>5</sup>Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K.H Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah

sebagai perhimpunan semua perkumpulan politik dan sosial di Jawa dan Madura. Tugas Putera untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Putera dipimpin oleh empat serangkai yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hadjar Dewantoro mewakili kaum nasionalis dan K.H. Mas Mansur mewakili golongan Islam dari organisasi Muhammadiyah. Komposisi ini memperlihatkan bahwa Jepang mengubah strategi politiknya yaitu meninggalkan kekuatan Islam dan beralih ke unsur nasionalis. Organisasi Putera berbeda dengan organisasi Islam, Putera memiliki wewenang untuk membentuk milisi sukarelawan yang pada akhirnya menjadi Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau yang lebih familiar disebut PETA.

Memasuki penghujung tahun 1943, kekuatan nasionalis yang dibentuk Jepang pun gagal memenuhi harapan. Putera malah menjadi corong perjuangan kaum nasionalis daripada membantu kepentingan Jepang, Jepang pun akhirnya membubarkan

---

untuk membujuk kaum Nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti, Persatuan Guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, radio dan telegraf, perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng dan Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Martin van Bruinessen. Rakyat Kecil, Islam dan Politik. (Yogyakarta, Gading: 2013). Hlm 28.

organisasi ini dan menggantinya dengan organisasi "Djawa Hokokai"<sup>6</sup>.

Dalam waktu yang hampir bersamaan Jepang kembali mengalihkan perhatiannya kepada kaum Islam. Namun kali ini Jepang mencoba merangkul kaum muslim terutama ulama-ulama pedesaan untuk menyingkirkan dan meruntuhkan kepemimpinan Islam perkotaan dan sekaligus nasionalis sekular.

Pada bulan November 1943 secara resmi Jepang meresmikan Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Masyumi dan membubarkan MIAI yang didominasi oleh para kaum Islam perkotaan. Masyumi menjadi sarana baru bagi Jepang untuk menarik simpati masyarakat muslim agar mendukung kepentingan perang Jepang yang terlihat mulai terdesak.

---

<sup>6</sup>Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakjat Djawamerupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1944 sebagai pengganti Putera. Agar rakyat Indonesia dapat dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan Hokoseiasyen (semangat kebaktian). Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah *Gunseikan* dan Soekarno menjadi penasihat utamanya. Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari *Hokokai* atau jenis pekerjaan (profesi), antara lain *Izi Hokokai* (Himpunan Kebaktian Dokter), *Kyoiku Hokokai* (Himpunan Kebaktian Pendidik), *Fujinkai* (Organisasi wanita) dan *Keimin Bunko Syidosyo* (Pusat budaya). Perkumpulan ini adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang. Martin van Bruinssen. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Hlm. 43.

Dalam perkembangannya ada dua jenis keanggotaan di Masyumi. Pertama adalah organisasi-organisasi Islam yang mendapatkan legalitas dari Jepang untuk beraktifitas. Kedua adalah para ulama atau pemimpin yang mendapatkan rekomendasi dari biro urusan agama. Masyumi pun dalam perjalanannya didominasi oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama karena hanya kedua organisasi ini yang mendapatkan legalitas Jepang untuk beraktifitas selanjutnya dua organisasi tradisional Persatuan Oemmat Islam pimpinan K.H. Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan Perikatan Oemmat Islam pimpinan K.H. Abdul Halim dari Cirebon juga menyusul bergabung.<sup>7</sup>

Pada bulan Februari 1945, Masyumi mendapatkan keuntungan dari usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari 1944, pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh-pengaruhnya sebagai representasi perjuangan rakyat Indonesia. Seiring dengan hal tersebut Jepang memberikan keleluasaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara. Masyumi benar-benar mampu memanfaatkan momentum dari keleluasaan tersebut, hal ini berbeda dengan MIAI yang sejak berdiri hingga dibubarkan tak pernah mampu memperluas jaringan diluar wilayah

---

<sup>7</sup>Benda. *Matahari Terbit dan Bulan Sabit*. hlm. 152.

kerja mereka yakni Jakarta. Masyumi dengan otoritas penuh dari Jepang mampu membentuk cabang diseluruh level kepengurusan, mulai dari tingkat Karisedenan, kawedanan, kecamatan, desa bahkan sampai ke kelompok-kelompok rukun tetangga bentukan Jepang. Bagi Jepang luasnya jaringan Masyumi diharapkan dapat memperkuat basis penguasaannya di Nusantara. Bahkan pada bulan Desember tahun 1944 Jepang mengumumkan pengoperasian satuan tentara sukarelawan Muslim Hizbullah. Perkumpulan semi militer ini diberi seragam dan perlengkapapan serdadu yang kemudian diberi pelatihan militer oleh tentara Jepang selama tiga bulan.<sup>8</sup>

Masyumi berbeda dengan organisasi Islam lain yang lahir sebelumnya, selama kurun waktu setahun sejak pendiriannya Masyumi mampu melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Diantara lain membangun jaringan keseluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang besar dan menyatukan berbagai kelompok perjuangan kaum Islam.

Pada bulan November 1945 atau tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan Masyumi mengadakan Kongres yang pertama kalinya. Dalam berbagai sidang, muncul perdebatan sengit antar peserta

kongres terkait nama organisasi. Para pendiri Masyumi bersikukuh untuk tetap menggunakan nama Masyumi karena struktur Masyumi sudah tersebar keseluruh wilayah Nusantara sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian mensosialisasikan nama yang baru, pihak yang lain berpendapat bahwa Masyumi adalah bentukan Jepang. Mereka tidak mau dibayang-bayangi masa lalu dan diolok-olok kaum nasionalis karena tetap mempertahankan organisasi bentukan Jepang. Setelah perdebatan yang cukup alot forum akhirnya memutuskan bahwa Masyumi tidak berubah nama, hanya dtambah kata partai didepannya menjadi Partai Masyumi.<sup>9</sup> Partai Masyumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia yang sekaligus merupakan satu satunya partai politik yang mewakili golongan Islam di Indonesia.<sup>10</sup>

### **Ideologi Politik dan Struktur Partai Masyumi**

Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1945 menyebutkan bahwa Masyumi berasaskan Islam<sup>11</sup> dan bertujuan untuk terlaksananya ajaran dan

<sup>9</sup>Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Kenegaraan*. (Jakarta, LP3ES, 1985) hlm. 110.

<sup>10</sup> Mukkadimah Anggaran Dasar Partai Masyumi Tahun 1945.

<sup>11</sup> Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal II.

<sup>8</sup>Wawancara dengan K.H. Yunus (Fungsionaris Partai Masyumi), 20 April 2015.

hukum Islam didalam kehidupan warga, masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia menuju keridhaan Ilahi<sup>12</sup> Masyumi dibentuk sebagai respon langsung terhadap tekad bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. Tindakan Belanda jelas membahayakan kedaulatan Negara Indonesia. padahal kedaulatan negara merupakan syarat mutlak bagi kesempurnaan terlaksananya ajaran agama Islam. Imperialisme adalah suatu kezaliman yang melanggar perikemanusiaan dan secara nyata diharamkan oleh agama Islam. Karena itu, untuk mempertahankan kedaulatan negara, setiap muslim wajib berjuang demi membela kemerdekaan negara dan agamanya. Perjuangan Masyumi adalah untuk melenyapkan kolonialisme dan imperialisme.

Partai Masyumi menghendaki Indonesia menjadi suatu “negara hukum” yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Menurut para tokoh Masyumi, suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut “negara Islam”, tapi negara itu disusun sesuai dengan ajaran Islam. Sebutan “negara Islam” adalah persoalan sekunder. Persoalan utama dalam hubungan Islam dan negara adalah bagaimana caranya agar ajaran-ajaran Islam dapat menjiwai kehidupan bernegara. Rancangan Undang-Undang Republik (Islam) Indonesia yang

diusulkan partai Masyumi merumuskan dua alternatif mengenai asas negara, yaitu “Republik Indonesia berdasarkan Islam” atau “Republik Islam Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rancangan tersebut menggambarkan cita-cita tertinggi partai Masyumi mengenai negara yang diinginkan oleh Islam.

Masyumi menggunakan tiga cara untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu dengan kekerasan, keterlibatan dalam pemerintahan, dan diplomasi. Ketiga cara ini dianggap sebagai cara-cara yang paling sesuai untuk dilakukan<sup>13</sup>.

Cara pertama dimulai dengan menggunakan otoritas karismatik para ulama untuk mengumumkan perang jihad untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme serta mengusir penjajah dari Indonesia. Kaum Kolonialis dan Imperialis telah merendahkan dan menghina agama Islam, maka tidak ada pilihan lain kecuali melawan mereka sebagai perang Sabil. Masyumi juga mendesak rayat untuk mengangkat senjata mengusir penjajah sebagai *fardhu ‘ain*. Bagi mereka yang mati dalam perang kemerdekaan itu adalah mati syahid.

Cara kedua, Masyumi segera melibatkan diri dalam proses penyusunan pemerintahan. Hal ini tidak dapat dipisahkan mengingat tokoh-tokoh Masyumi merupakan tokoh-tokoh yang

<sup>12</sup> Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal III.

<sup>13</sup> Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IV.

terlibat dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman penjajahan. Sejak awal kemerdekaan, beberapa tokoh Masyumi telah ikut dalam kabinet, parlemen, dan jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Masyumi memandang keterlibatan secara langsung dalam pemerintahan sebagai suatu jalan strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan cara demikian, hukum-hukum Allah tidak saja disampaikan melalui mimbar di masjid, tetapi juga melalui pejabat-pejabat pemerintahan dalam bentuk undang-undang negara. Sesuai dengan pandangan dasarnya yang memandang pluralisme sebagai hal yang positif membuat Masyumi dapat dengan mudah berkoalisi dengan pihak-pihak lain.

Cara ketiga dilakukan Masyumi melalui aktivitas diplomatik dengan tokoh-tokoh di negara lain dan organisasi internasional untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Struktur organisasi Partai Masyumi memperlihatkan adanya pembedaan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi, yaitu fungsi legislatif melalui muktamar dan dewan partai, fungsi eksekutif melalui pimpinan partai, dan fungsi badan penasehat melalui majelis syura.

Muktamar adalah badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur partai. Badan ini dipandang sebagai manifestasi Al-Qur'an dan Sunnah untuk melakukan syura'. Anggota-anggota muktama dianggap mewakili seluruh

anggota. Muktamar memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Partai, mengesahkan ideologi partai, menetapkan program, dan membuat pernyataan-pernyataan politik. Ia juga berhak membentuk Dewan Partai, memilih pimpinan partai, dan meminta pertanggungjawabannya pada akhir masa jabatannya<sup>14</sup>.

Dewan Partai merupakan Badan Pelaksana Muktamar. Badan ini beranggotakan 60 orang yang mewakili cabang-cabang partai, kaum ulama, dan organisasi-organisasi Islam yang menjadi anggota istimewa Masyumi. Tugas utama Dewan partai adalah mengontrol pekerjaan dan aktivitas pimpinan partai, menyesuaikan program bila diperlukan, membuat Anggaran Rumah Tangga, mengesahkan perubahan kecil dalam susunan Pimpinan Partai, dan mempersiapkan agenda dan tata tertib yang akan dibahas oleh Muktamar berikutnya<sup>15</sup>.

Pimpinan Partai merupakan badan eksekutif tertinggi dalam struktur organisasi partai. Badan ini dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakilnya, seorang Sekretaris Jenderal dan wakilnya, ketua-ketua bagian, dan pembantu-pembantu yang seluruhnya berjumlah 15 orang. Tugas utama Pimpinan Partai adalah memimpin dan melaksanakan, serta

---

<sup>14</sup>Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IX.

<sup>15</sup>Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal X.

menentukan strategi perjuangan partai dalam batas-batas keputusan Mukhtar dan Dewan Partai.

Majelis Syura adalah badan penasehat dan pemberi pertimbangan kepada Pimpinan Partai dalam pekerjaan partai. Badan ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, sekretaris Jenderal dan wakilnya, serta pakar-pakar yang berjumlah sama dengan jumlah cabang-cabang partai karena setiap cabang harus menunjuk seorang ulama untuk menjadi ahli majelis ini. Untuk menjalankan tugas sehari-hari majelis membentuk Dewan Harian Majelis Syura. Pimpinan. Majelis Syura sekaligus merangkap Pimpinan Dewan Harian Majelis Syura.

Masyumi memisahkan badan eksekutif, legislatif, dan badan penasehat. Hak dan kekuasaan tertinggi dalam partai terletak pada seluruh anggota partai, tetapi dilakukan secara tidak langsung melalui Mukhtar. Keputusan mayoritas mukhtar adalah keputusan yang mengikat.

Suatu persoalan yang menarik dalam struktur organisasi Masyumi adalah mengenai fungsi Majelis Syura. Dilihat dari kedudukannya dalam struktur organisasi, badan ini bukanlah badan legislatif. Fungsi badan ini adalah badan penasehat. Prosedur pembentukannya yang dilakukan oleh Pimpinan Partai menyebabkan posisinya tidak mungkin lebih tinggi dari badan eksekutif yang membentuknya tersebut. Kesangsian mengenai fungsi Majelis Syura

disebabkan oleh salah satu fungsinya sebagai badan yang memberi pertimbangan, mengeluarkan fatwa yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Masyumi, termasuk Pimpinan Partai.

### **Aktifitas Partai Masyumi Dalam Era Revolusi Fisik**

Sebagai Negara yang telah merdeka, para pemimpin bangsa berusaha mencari formulasi kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pada masa itu lebih tepat disebut dengan masa formulasi atau masa pencarian jatidiri. Berbagai kelompok pada saat itu terus berdiskusi dan berdebat untuk mencari format yang tepat untuk menyelenggarakan dan membuat sistem pemerintahan.<sup>16</sup>

Dalam UUD 1945 telah diatur Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi. Hal ini berjalan pada bulan Agustus 1945 dengan membentuk kabinet pertama Republik Indonesia. Pada bulan November 1945 dibentuklah kabinet pertama yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir yang disetujui oleh KNIP dan Presiden. Pembentukan kabinet Sjahrir bertujuan untuk membersihkan kalangan pemerintah dari orang-orang yang diindikasikan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Dengan demikian telah berubah sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi

<sup>16</sup>Muhammad Alfian. *Dinamika Politik Di Indonesia*. (Bandung, Pustaka Setia: 2015). hlm. 44.

parlementer. Berkaitan dengan diubahnya sistem pemerintahan, Partai Masyumi menolak perubahan tersebut karena sistem Presidensial dirasa lebih dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Bahkan partai Masyumi bukan hanya tidak sepakat dengan sistem parlementer namun juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap kabinet Sjahri.

Penolakan tersebut didasari oleh sikap Sjahrir yang cenderung sangat kooperatif dengan pihak Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia, Sjahrir lebih mengedepankan perundingan padahal partai Masyumi menganggap model kepemimpinan Sjahrir hanya akan mendegradasi mental dan moral bangsa Indonesia yang saat itu sedang dalam puncak semangat dan motivasi dalam mempertahankan kemerdekaan.<sup>17</sup>

Ketidakpercayaan partai Masyumi kepada kabinet Sjahrir kemudian menimbulkan tuntutan restrukturisasi kabinet Sjahrir dan menuntut suatu kabinet koalisi. Dalam perkara ini partai Masyumi satu pemahaman dengan organisasi Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Selanjutnya menyusul partai-partai politik lainnya tentang apa yang digagas partai Masyumi tentang sistem pergantian kabinet. Misalnya, PNI yang mengambil keputusan dalam kongres PNI

tanggal 20-30 Januari 1946. Tekanan-tekanan tersebut berhasil dan berdampak pada pembubaran kabinet Sjahrir yang ditandai dengan pengembalian mandat oleh Sutan Sjahrir kepada Presiden Soekarno.<sup>18</sup>

Tanggal 12 Maret 1946 diumumkan kabinet baru yang juga dibawah kepemimpinan Sjahrir atau kabinet Sjahrir II. Dalam kabinet ini partai Masyumi berhasil menempatkan empat kadernya dalam pemerintahan, antara lain Arudji Kartawinata sebagai Menteri Muda Pertahanan, Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Muda Keuangan, M. Natsir sebagai Menteri Penerangan dan Muhammad Rasyidi sebagai Menteri Keuangan.

Peristiwa 3 Juli 1946 dalam suatu usaha perebutan kekuasaan atau kudeta kepada Presiden Sukarno membuat kabinet Sjahrir membubarkan diri dan kembali menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Pada tanggal 2 Oktober 1946 keadaan yang mulai berangsur-angsur membaik dijadikan presiden Sukarno sebagai momentum untuk kembali menyusun kabinet dan Sjahrir kembali dipercaya untuk ketiga kalinya memimpin kabinet, namun dalam kabinet Sjahrir III partai Masyumi berhasil menempatkan lebih banyak kadernya dalam pemerintahan dari empat orang menjadi enam orang.

<sup>17</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*. (Jakarta, LP3ES: 1987) hlm.154.

<sup>18</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm. 157.

Keenam orang tersebut adalah Mohammad Roem sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Muhammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Jusuf Wibisono sebagai Menteri Muda Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan, Fathurrahman sebagai Menteri Agama dan Wachid Hasyim sebagai Menteri Negara.

Dalam perundingan Linggarjati<sup>19</sup> yang dimulai pada 10 November 1946, untuk pertama kalinya mempertemukan secara langsung antara pihak Indonesia dan Belanda. Pemerintah Indonesia terpaksa menjalankan politik diplomasi karena bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda. Pada tanggal 15 November dicapai kata sepakat dalam perundingan tersebut.

Saat hasil perundingan Linggarjati diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berlangsung di Malang untuk mendapatkan pengesahan, terjadi

---

<sup>19</sup>Pihak Inggris terus mengupayakan perundingan agar menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda dengan perantaraan diplomat Inggris, Lord Killearn. Pada awalnya pertemuan diselenggarakan di Istana Negara dan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dipimpin Sutan Syahrir dan pihak Belanda oleh Pro. Schermerhorn. Kemudian perundingan dilanjutkan di Linggarjati. Berikut isi perjanjian Linggarjati: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra, Akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negaranya adalah Republik Indonesia, Dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai kepala uni, Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949.

perdebatan yang cukup seru dan alot antara pihak yang menentang dengan pihak yang mendukung perjanjian Linggarjati. Meskipun terdapat enam menteri dari partai Masyumi yang duduk dipemerintahan, partai Masyumi dengan tegas menolak dan menentang perjanjian tersebut. Partai Masyumi berpandangan bahwa perjanjian Linggarjati hanya akan merugikan pemerintah Indonesia karena pemerintah hanya akan mendapatkan pulau Jawa dan Sumatera saja dan kedaulatan yang ditawarkan pemerintah Belanda hanya akan memasung kemandirian Indonesia dalam mengelola sebuah negara.

Untuk mengatasi dinamika dan perdebatan tersebut, dikeluarkanlah peraturan Presiden No. 6/1946 tentang penambahan anggota KNIP. Namun Perpres tersebut juga mendapat perlawanan keras dari partai Masyumi dan PNI, demikian pula dari internal KNIP sendiri. Meskipun banyak mendapat pertentangan, perpres tersebut tetap berlaku dengan rincian anggota sebagai berikut seratus sepuluh orang utusan dari daerah, enam puluh orang dari partai politik dan sepuluh orang ditunjuk oleh Presiden.<sup>20</sup>

Pada tanggal 25 Maret 1947 naskah perjanjian Linggarjati akhirnya ditandatangani oleh delegasi Indonesia dan

---

<sup>20</sup>Busyairi Baddaruzman. *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*. (Jakarta, Pustaka Panji Mas: 1995) hlm. 199

Belanda di Jakarta. Kesepakatan ini dinilai Masyumi sebagai kemunduran dalam diplomasi dan berdampak kepada penarikan dukungan kepada kabinet Sjahrir sehingga Sutan Sjahrir kembali dipaksa untuk mengundurkan diri pada akhir Juni 1947. Partai Masyumi menganggap Sjahrir telah menyimpang dari garis diplomasi dan terlalu banyak memberikan ruang-ruang konsesi kepada pihak Belanda.<sup>21</sup>

Kabinet Sjahrir kali ini benar-benar telah tamat dan digantikan oleh kabinet Amir Sjarifuddin. Pembentukan kabinet Sjarifuddin memiliki arti tersendiri bagi partai Masyumi karena pertama kalinya partai Masyumi mengalami perpecahan semenjak berdirinya. Perpecahan ini berawal dari pemberian mandat dari Presiden Sukarno kepada berbagai elemen kelompok untuk membentuk kabinet koalisi. Kelompok-kelompok tersebut diwakili oleh A.K Gani dari PNI, Setiadjud dari Buruh, Amir Sjarifuddin dari Sosialis dan Sukiman dari partai Masyumi. Usaha pembentukan koalisi ini mengalami jalan buntu karena partai Masyumi menginginkan pos-pos tertentu yakni Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Tuntutan Masyumi tentu saja ditolak oleh anggota koalisi. Setelah tuntutan Masyumi tidak dikabulkan mereka menarik diri dari formatur kabinet dan Amir

Sjarifuddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan golongan Islam pada saat itu diwakili oleh PSII yang berarti PSII telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan istimewa partai Masyumi.<sup>22</sup>

Penolakan partai Masyumi terhadap kabinet Amir Sjarifuddin berakhir tatkala mereka mendudukkan para kadernya dalam kabinet, dengan alasan merasa bertanggung jawab dalam perjuangan menghadapi Belanda, pada tanggal 13 November 1947 partai Masyumi mengirim Syamsuddin sebagai Wakil Perdana Menteri, K.H. Masykur sebagai Menteri Agama, dan Kasman Singodimedjo sebagai Wakil menteri kehakiman. Setelah mendapatkan jabatan-jabatan tersebut partai Masyumi mendukung penuh keberlangsungan kabinet Amir Syarifuddin.<sup>23</sup>

Dalam perjalanan kabinet Amir Sjarifuddin, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya dan otomatis menggugurkan perundingan Linggarjati yang telah disepakati. Agresi Belanda menimbulkan kecamuk dalam sengketa Indonesia-Belanda. Situasi ini mengundang perhatian dunia Internasional dan memaksa PBB untuk turun tangan dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mempertemukan pihak Indonesia dan

---

<sup>22</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm.171.

<sup>23</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm.175.

---

<sup>21</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm. 169.

Belanda. KTN diwakili oleh Amerika Serikat yang mengutus Frank Graham, Australia yang diwakili oleh Richard Kirbi dan delegasi Belgia yang mendelegasikan Paul Van Zeeland. KTN berhasil mempertemukan Belanda dan Indonesia yang berujung pada disepakatinya perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditandatangani oleh Amir Sjarifuddin sebagai wakil dari Indonesia dan Abdul Kadir Widjiyatmodjo dari pihak Belanda. Perjanjian Renville dipandang semakin melemahkan posisi Indonesia karena Belanda semakin leluasa mengendalikan situasi dan memutuskan kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan perjuangan Indonesia dalam memperoleh kedaulatannya.<sup>24</sup>

Tindakan Amir Sjarifuddin menandatangani perjanjian Renville cukup menimbulkan krisis politik yang dinamis di dalam negeri. Partai Masyumi pun mengeluarkan sikap resmi partai yakni menolak segala upaya diplomasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin termasuk kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Renville karena sejarah mencatat bahwa perjanjian Renville merupakan titik terendah dalam upaya perjuangan diplomasi dengan Belanda. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari partai Masyumi menolak

perjanjian Renville, yang pertama adalah Perjanjian Renville memiliki nilai kedaulatan paling memperhatikan dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian diplomatic sebelumnya, yang kedua adalah sikap arogansi Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang tidak meminta persetujuan kabinet, padahal jelas-jelas seluruh anggota kabinet dari berbagai elemen didalamnya menyatakan secara bulat menolak kesepakatan perjanjian Renville.<sup>25</sup>

Dalam sidang yang diadakan pada tanggal 18 Januari 1948 oleh Dewan Partai Nasional Indonesia menuntut supaya kabinet Amir Sjarifuddin dibubarkan. Akhirnya kabinet Amir Sjarifuddin yang hanya didukung oleh kelompok kiri tidak sanggup menguasai keadaan sehingga tanggal 23 Januari 1948 Amir Sjarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Sebagai pengganti Amir Sjarifuddin, Presiden Sukarno menunjuk Muhammad Hatta yang saat itu menjadi wakil Presiden untuk membentuk kabinet Presidensiil darurat yang bukan bertanggung jawab kepada KNIP tapi kepada presiden Sukarno. Anggota-anggota kabinetnya terdiri dari golongan tengah yakni Partai Masyumi, PNI dan Profesional. Kelompok kiri sebenarnya diajak bergabung dalam kabinet Hatta dan ditawarkan tiga menteri oleh Hatta namun

---

<sup>24</sup>M. Rickelf. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985) hlm. 339.

---

<sup>25</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm.178.

golongan kiri meminta paling tidak empat menteri termasuk menteri pertahanan. Partai Masyumi menolak dengan keras karena selama Amir Sjarifuddin memegang kabinet partai Masyumi menganggap kinerja mereka gagal.

Karena tidak ada kesepakatan antara Hatta dan golongan kiri serta adanya penolakan kehadiran Amir Sjarifuddin oleh partai Masyumi maka Muhammad Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa kehadiran golongan kiri yang telah memutuskan menjadi oposisi murni.<sup>26</sup>

Pada tahun 1948 Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua. Kota Yogyakarta yang menjadi ibukota Indonesia digempur oleh pasukan Belanda dibawah komando Jenderal Spoor dan seketika itu juga Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville, dampak dari agresi militer Belanda tersebut menyebabkan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap Presiden Sukarno mengumumkan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang dikenal PDRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara yang merupakan tokoh Masyumi.

Pada periode ini peran partai Masyumi cukup vital, Sjafruddin Prawiranegara dalam sebuah kesempatan

mengatakan bahwa sebenarnya pada saat itu dia tidak menerima intruksi apapun terkait PDRI baik sebelum maupun sesudah agresi militer II Belanda dengan kata lain Sjafruddin dan partai Masyumi mengklaim bahwa merekalah yang sebenarnya memprakarsai terbentuknya PDRI di Bukittinggi.<sup>27</sup>

Keberadaan PDRI menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa klaim pemerintah Belanda bahwa pemerintah Indonesia telah lumpuh tidaklah benar, atau paling tidak dinilai kurang akurat. Adanya pengumuman dan kontak yang dilakukan oleh PDRI kepada dunia luar menunjukkan posisi Indonesia yang sebenarnya dan hal ini menginisiasi lahirnya Inter Asian Conference di New Delhi India yang mendukung penuh perjuangan Indonesia menghadapi serangan agresi militer dua Belanda. IAC ini kemudian mendorong PBB untuk turun tangan. Selain itu lahirnya PDRI menjadi stimulus tersendiri bagi perjuangan gerilya oleh berbagai laskar dan tentara yang dipimpin Jenderal Sudirman untuk terus berjuang menghadapi arogansi militer pemerintah Belanda.<sup>28</sup>

Aksi agresi militer dua Belanda akhirnya diselesaikan lewat perundingan resmi antara Indonesia dan Belanda.

---

<sup>27</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm.188.

<sup>28</sup>.Anshary, Endang Syaifuddin. *Pak Natsir 80 Tahun* (Jakarta: Media Dakwah, 1988) hlm. 159.

---

<sup>26</sup>M. Ricklef. *Sejarah Indonesia Baru*. hlm. 340

Perundingan ini dimulai pada 14 April 1949 dengan pengawasan dari PBB dengan membentuk *United Nations Commissions For Indonesia* (UNCI). Dalam perundingan ini delegasi Indonesia diwakili oleh M. Roem dan M. Natsir sebagai penasihat. Sedangkan dari delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. Van Royen. Persetujuan dicapai pada tanggal 9 Mei 1949. Hasil dari kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian Roem-Royen yang isinya antara lain pengembalian Kota Yogyakarta yang telah dikuasai Belanda kepada Indonesia, Gencatan senjata diantara kedua belah pihak dan pembebasan tawanan para pemimpin yang ditangkap oleh Belanda.

Perjanjian Roem-Royen cukup stabil dan membuka jalan untuk pengembalian kedaulatan Indonesia yang ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 02 November 1949. Dalam KMB Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan M. Roem. Poin kesepakatan KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kedaulatan Indonesia diserahkan oleh pihak Belanda kepada Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 di Den Haag. Penyerahan kedaulatan tersebut menandai berakhirnya campur tangan pemerintah Belanda dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sekaligus diakui secara resmi oleh dunia Internasional.

### **Penutup**

Masa pendudukan Jepang menjadi tahap yang fundamental bagi kelahiran Partai Masjumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang saat itu disebut "Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia Raya". Pada bulan November 1943 lahirlah Masjumi pertama, Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia. Masyumi menjadi sarana baru bagi Jepang untuk menarik simpati masyarakat muslim agar mendukung kepentingan perang Jepang yang terlihat mulai terdesak. Pada bulan Februari 1945, Masyumi mendapatkan keuntungan dari usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari 1944, pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh-pengaruhnya sebagai representasi perjuangan rakyat Indonesia. Seiring dengan hal tersebut Jepang memberikan keleluasaan pergerakan Masyumi hingga kesuluruh wilayah Nusantara. Masyumi berbeda dengan organisasi Islam lain yang lahir sebelumnya, selama kurun waktu setahun sejak pendiriannya Masyumi mampu melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Diantara lain membangun jaringan kesuluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang besar dan menyatukan berbagai

kelompok perjuangan kaum Islam. Partai Masyumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia yang sekaligus merupakan satu-satunya partai politik yang mewakili golongan Islam di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

*Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal II*

*Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal III*

*Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IV*

*Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal IX*

*Anggaran Dasar Partai Masyumi Pasal X*

Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Kenegaraan*. (Jakarta, LP3ES, 1985)

Anshary, Endang Syaifuddin. *Pak Natsir 80 Tahun* (Jakarta: Media Dakwah, 1988)

Benda, J. *Bulan Sabit dan Matahari*. (Jakarta, Pustaka Jaya: 1980)

Busyairi Baddaruzman. *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*. (Jakarta, Pustaka Panji Mas: 1995)

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*. (Jakarta, LP3ES: 1987)

Kamaruzzaman. *Wajah Baru Islam Indonesia*. (Yogyakarta, UII Press: 2001).

M.Rickelf. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985)

Martin van Bruinessen. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. (Yogyakarta, Gading: 2013)

Muhammad Alfan. *Dinamika Politik Di Indonesia*. (Bandung, Pustaka Setia: 2015)

Mukkadimah *Anggaran Dasar Partai Masyumi Tahun 1945*.

Remy Madinier. *Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung, Mizan: 2013).